



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211

Situs : [bengkayangkab.go.id](http://bengkayangkab.go.id)

**LKIP**  
**2024**

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (LKIP)**





## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah selama tahun 2024 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Kami berusaha dan berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang telah diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kami menyadari belum dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami mengharapkan semua masukan serta saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan yang akan datang.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

---

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi para pemimpin unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Bengkayang, 25 Februari 2025  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**



**YUSTIANUS, S.E., M.M.**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19691116 200003 1 004



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    GAMBARAN UMUM .....	1
1.    Pendahuluan.....	1
2.    Struktur Organisasi .....	3
3.    Tupoksi .....	6
4.    Sumber Daya Aparatur (SDA).....	22
5.    Sumber Daya Keuangan.....	26
6.    Sarana dan Prasarana .....	27
7.    Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	30
B.    PERMASALAHAN UTAMA .....	31
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>35</b>
A.    RENSTRA .....	35
1.    Visi.....	35
2.    Misi .....	38
3.    Tujuan dan Sasaran Strategi beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	40
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>54</b>
A.    CAPAIAN KINERJA .....	54
1.    Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:.....	55
2.    Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. ....	83
3.    Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022, 2023,2024 dan target Renstra .....	86
4.    Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	93
5.    Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. ....	93
D.    REALISASI ANGGARAN .....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A.    Kesimpulan .....	110



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2024 ini memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.





Sedangkan yang melandasi laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) ini adalah:

- a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- j. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- k. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja:

Adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, hasil akhir yang dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuan dalam



penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kedudukan:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pada dasarnya memberi kewenangan yang luas nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam NKRI.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang Bupati Bengkayang Nomor 79 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2020 Bengkayang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah :

1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris daerah;
- b. Staf Ahli;
  1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  2. Staf Ahli Bupati Bidang pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;



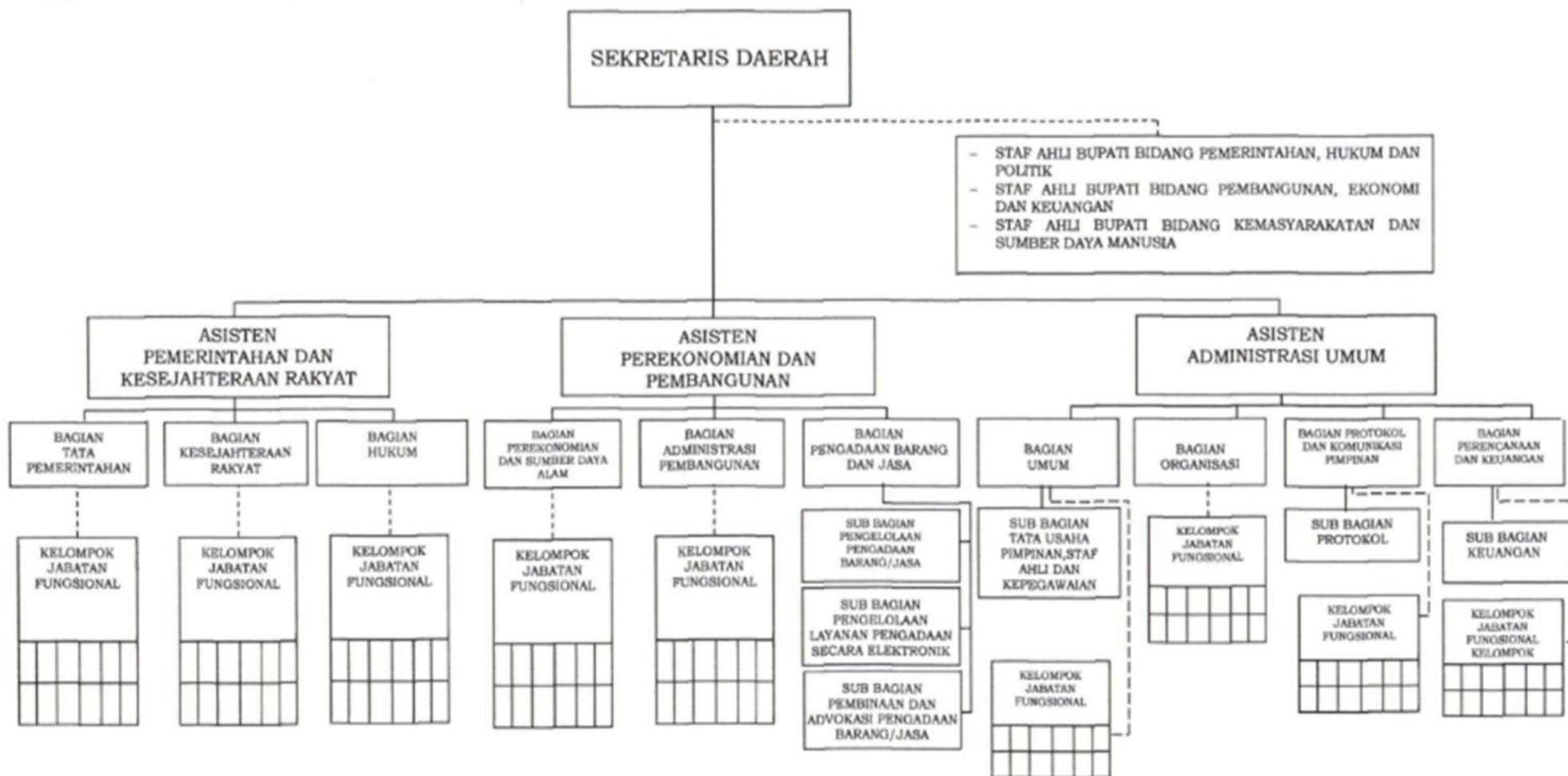
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten I, terdiri dari:
    1. Bagian Tata Pemerintahan;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    3. Bagian Hukum.
  - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten II, terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
      - a). Sub Bagian Pengelolaan Barang/Jasa;
      - b). Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
      - c). Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - e. Asisten Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten III, terdiri dari:
    1. Bagian Umum, terdiri dari:
      - a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, terdiri dari:
    2. Bagian Organisasi;
    3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
      - a). Sub Bagian Protokol
    4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
      - a). Sub Bagian Keuangan.
- 2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG





### **3. Tupoksi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, bahwa tugas pokok Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, membina hubungan kerja dengan seluruh Perangkat Daerah dan satuan organisasi lainnya.

Tugas dan fungsi Masing-masing Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Pelaksana :

#### **1. Sekretaris Daerah**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah dijabarkan dalam rincian tugas sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh pejabat lain yang ditunjuk Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik**

Staf Ahli Bupati Bengkayang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati mengenai Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, dalam melaksanakan tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan;



- b. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- c. Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai dengan bidangnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas tugasnya.

### **3. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan**

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati mengenai Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan;
- c. Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai bidangnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

### **4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia**

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pemberian pertimbangan kepada Bupati dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan mewakili Pemerintah Daerah dengan penugasan sesuai bidangnya; dan



- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

## **5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kerjasama, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantuan, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintah, hukum dan kerjasama;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerjasama;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerjasama;
- e. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh bagian-bagian di bawahnya yaitu:

- a. Kepala Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bagian Hukum.

### **a. Kepala Bagian Pemerintahan**

Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan



perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

**b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

**c. Kepala Bagian Hukum**

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;





dan

- e. Pelaksanaan tugas fungsi yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

## **6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembanguna, sumber daya alam dan administrasi pembangunan;
- b. Pengoodinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tyjuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam dan administrasi pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh bagian-bagian yang dibawahnya yaitu:

- a. Bagian Perekononiam dan Sumber Daya Alam;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan;



c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

**a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam, dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

**b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**

Kepala Bagian Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang



- penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
  - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan dan;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

**c. Kepala Bagian Barang dan Jasa**

Kepala Bagian Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Bagian Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah



terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomiandan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas fungsinya dibantu oleh yaitu:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

**a. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam inventarisasi, perencanaan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa
- d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.



**b. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengelola dan mengembangkan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
- c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
- d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. mengelola informasi kontrak;
- h. mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

**c. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**

Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pembinaan pelaku pengadaan barang dan jasa, pendampingan penggunaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa



dan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan personel UKPBJ;
- b. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa;
- c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. mengelola personil UKPBJ;
- g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ
- h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
- k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
- l. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.





## **7. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum, dibantu oleh bagian-bagian yang dibawahinya, yaitu:

- a. Bagian Umum
- b. Bagian Organisasi
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

### **a. Kepala Bagian Umum**

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum membawahi Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Kepala Bagian Umum dalam pengelolaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan tata usaha umum, persuratan dan kepegawaian Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **b. Kepala Bagian Organisasi**

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten III



Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

**c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok membantu Asisten III Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di



- bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi Sub Bagian Protokol, Suba Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam tata protokoler, menyiapkan informasi, fasilitasi dan koordinasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **d. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan



fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam mengelola keuangan sekretariat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
- b. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah;
- c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

### **Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana**

Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan



peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen utama dalam organisasi atau perusahaan yang mencakup individu-individu yang berkontribusi melalui tenaga, pikiran, keterampilan, dan kreativitas mereka untuk mencapai tujuan tertentu. SDM tidak hanya mengacu pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada kualitas, kompetensi, dan potensinya untuk berkembang.





Sumber daya manusia merupakan aset strategis yang berperan penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif, karena kemampuan manusia untuk berinovasi, beradaptasi, dan memberikan solusi kreatif adalah faktor yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM sering dianggap sebagai langkah penting untuk keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi.

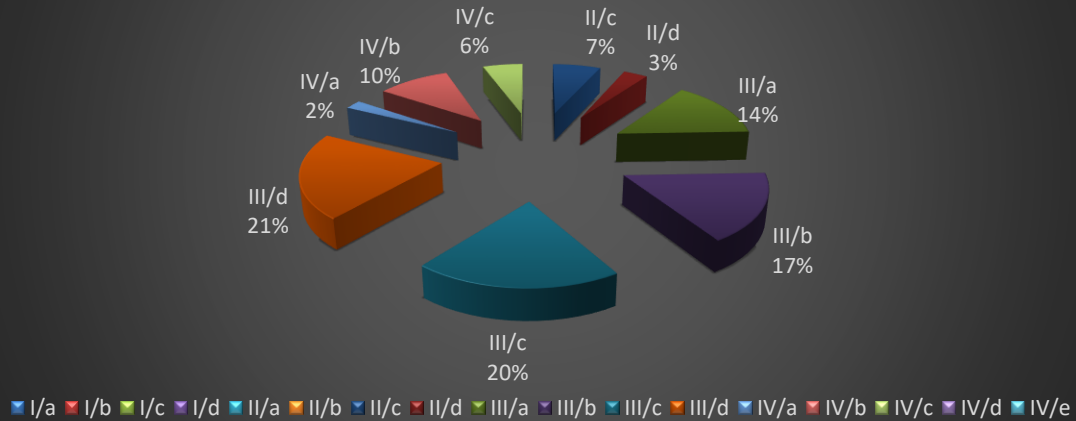
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang didukung oleh 195 ASN dan 140 Non ASN dengan Komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

Pangkat / Golongan		Jumlah	
Gol. I	I/a		0
	I/b		
	I/c		
	I/d		
Gol. II	II/a		9
	II/b		
	II/c	6	
	II/d	3	
Gol. III	III/a	18	70
	III/b	15	
	III/c	18	
	III/d	19	
Gol. IV	IV/a	2	16
	IV/b	9	
	IV/c	5	
	IV/d		
	IV/e		



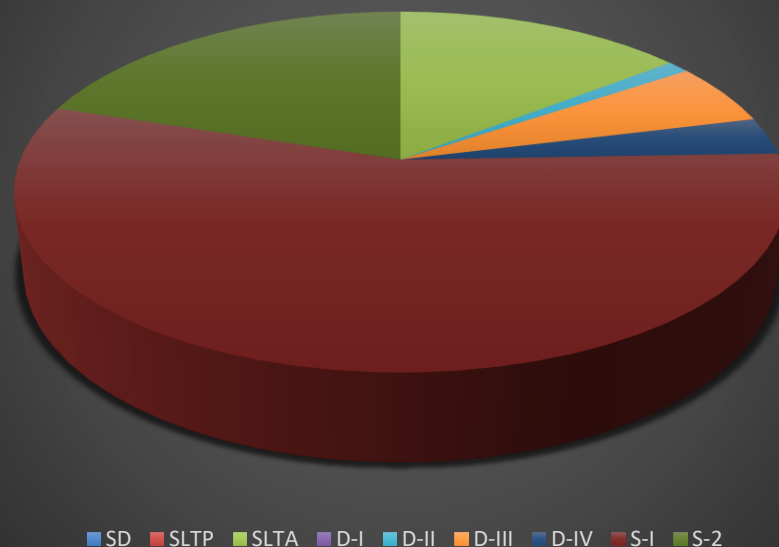
### Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan



**Tabel 4.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan									Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-I	S-2	
1	0	0	13	0	1	5	3	55	18	95

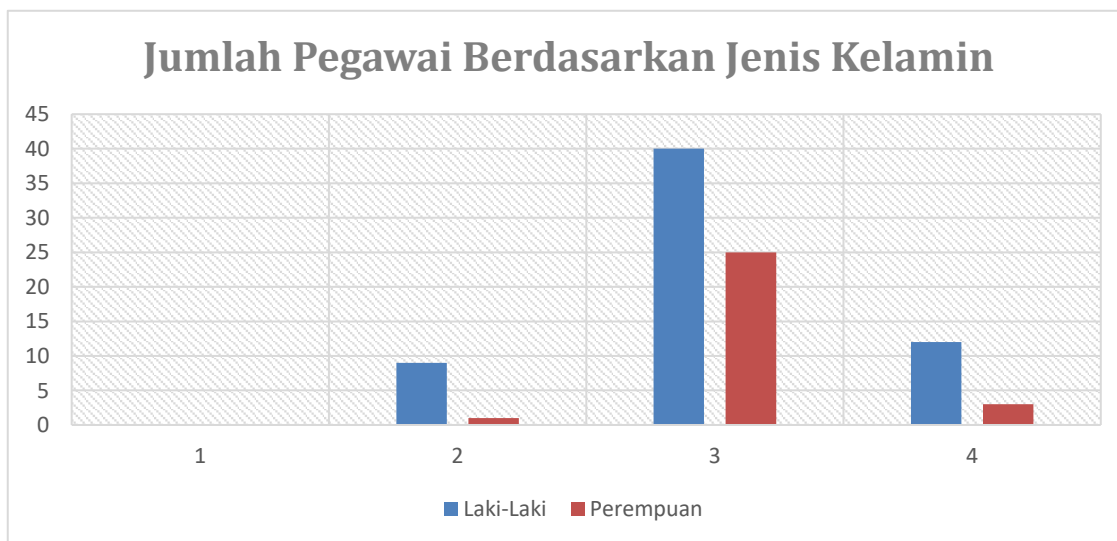
### Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan





**Tabel 4.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-Laki	0	9	42	12	63
2	Perempuan	0	1	28	3	32



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, dapat melalui proses diklat baik berupa diklat kepemimpinan, diklat profesi, melalui kursus-kursus, diklat fungsional berdasarkan pembinaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan pekerjaan secara khusus sesuai fungsinya. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki total Pegawai sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang yang terdiri dari 90 (sembilan puluh) personil Pegawai Negeri Sipil dengan rincian dengan rincian 22 (*dua puluh dua*) orang adalah pejabat struktural, Jabatan Fungsional 31 (*tiga puluh satu*) orang, staf berjumlah 37 (*tiga puluh tujuh*) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 5 (*lima*) orang dan 140 (*seratus empat puluh*) orang Pegawai Honorer.



## 5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam mendukung aktivitas individu, organisasi, atau negara. Keuangan yang dikelola dengan baik memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan berbagai program atau proyek untuk mencapai tujuan tertentu.

Berikut adalah alasan mengapa sumber daya keuangan memiliki peran penting yaitu Sumber daya keuangan diperlukan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti membayar gaji, membeli bahan baku, dan membiayai perawatan fasilitas. Tanpa keuangan yang memadai, operasional bisa terganggu, bahkan terhenti. Dengan sumber daya keuangan yang memadai, organisasi dapat merencanakan jangka panjang, seperti ekspansi bisnis, pengembangan proyek infrastruktur, atau peluncuran program sosial.

Sumber daya keuangan adalah fondasi bagi keberhasilan dan keberlanjutan. Pengelolaan yang bijak dan strategis sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara efektif dalam mendukung tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, baik dalam skala individu, organisasi, maupun nasional.

Untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yaitu sebesar **Rp.32.913.614.485,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. **Belanja Operasi** sebesar **Rp.31.819.477.784,-** terdiri dari **Belanja pegawai** sebesar **Rp.12.569.940.056,-**, **Belanja barang dan jasa** sebesar **Rp.15.314.537.718,-** dan **Belanja Hibah** sebesar **Rp.3.935.000.000,-** serta **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** sebesar **Rp.1.094.136.701,-**. dengan rincian sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut pada tabel 5.1.



**Tabel 5.1**  
**Sumber Daya Keuangan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>31.819.477.784,-</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	12.569.940.056,-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.314.537.718,-
5.1.05	Belanja Hibah	3.935.000.000,-
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.094.136.701,-</b>
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.094.136.701,-
<b>Jumlah</b>		<b>32.913.614.485,-</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah komponen penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas, baik dalam konteks pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat umum. Sarana merujuk pada alat atau fasilitas langsung yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas, sedangkan prasarana mengacu pada infrastruktur dasar yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Berikut adalah alasan mengapa sarana dan prasarana memiliki peran penting.

Sarana dan prasarana bukan sekadar fasilitas, tetapi merupakan elemen strategis yang memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kemajuan suatu komunitas atau organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas bagi individu, organisasi, maupun pemerintah.

Untuk menunjang Sarana dan Prasarana Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu, maka diperlukan fasilitas yang cukup memadai, agar setiap kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini beberapa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah:



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

- a. Aset Tanah yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebanyak 637 persil;
- b. Aset Peralatan dan Mesin yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebanyak 3.260 Unit;
- c. Aset Gedung dan Bangunan yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebanyak 133 buah;
- d. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebanyak 128 buah;
- e. Aset Tetap lainnya yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebanyak 82 buah;
- f. Aset lainnya yang tercatat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebanyak 343 buah.

Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1

**Tabel 6. 1**  
**Daftar Inventaris Sekretariat Daerah Tahun 2024**  
**Kabupaten Bengkayang**

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	01	01	TANAH	637	57.921.155.168,00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	3.260	59.989.944.613,63	
		01	- Alat Besar	12	869.012.421,00	
		02	- Alat Angkut	122	23.502.490.227,00	
		03	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	99	1.604.403.121,95	
		04	- Alat Pertanian	20	129.375.865,00	
		05	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.361	24.393.596.965,68	
		06	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	188	2.931.677.944,00	
		07	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	15.505.750,00	
		08	- Alat Laboratorium	100	1.712.884.240,00	
		09	- Alat Persenjataan	1	2.450.000,00	
		10	- Komputer	347	4.754.296.591,00	
		11	- Alat Eksplorasi		0,00	
		12	- Alat Pengeboran		0,00	
		13	- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		0,00	
		14	- Alat Bantu Eksplorasi		0,00	
		15	- Alat Keselamatan Kerja	6	42.651.488,00	
		16	- Alat Peraga		0,00	
		17	- Peralatan Proses / Produksi		0,00	
		18	- Rambu-rambu		0,00	
		19	- Peralatan Olahraga	3	31.600.000,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	133	115.519.401.347,00	





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

		01	- Bangunan Gedung	117	112.822.964.588,00	
		02	- Monumen	5	859.003.201,00	
		03	- Bangunan Menara		0,00	
		04	- Tugu titik Kontrol / Pasti	11	1.837.433.558,00	
4	04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>128</b>	<b>60.392.223.136,00</b>	
		01	- Jalan dan Jembatan	25	32.369.931.225,00	
		02	- Bangunan Air/Irigasi	10	1.828.948.876,00	
		03	- Instalasi	15	3.433.120.287,00	
		04	- Jaringan	78	22.760.222.748,00	
5	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>82</b>	<b>296.575.310,00</b>	
		01	- Bahan Perpustakaan	36	171.700.000,00	
		02	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahra	46	124.875.310,00	
		03	- Hewan		0,00	
		04	- Biota Perairan		0,00	
		05	- Tanaman		0,00	
		06	- Barang Koleksi Non Budaya		0,00	
		07	- Aset Tetap Dalam Renovasi		0,00	
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>0,00</b>	
			JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	4.240	294.119.299.574,63	
			Akumulasi Penyusutan		(123.594.596.727,92)	
			JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	4.240	170.524.702.846,71	
7	07		<b>ASET LAINNYA</b>	<b>115</b>	<b>1.551.995.480,00</b>	
		03	- Aset Tak Berwujud	1	209.745.000,00	
		04	- Aset Lain-lain	114	2.883.782.694,88	
			Amortisasi		(209.745.000,00)	
			Penyusutan aset lain-lain		(1.331.787.214,88)	
			<b>TOTAL</b>	<b>4.355</b>	<b>172.076.698.326,71</b>	



## **7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, kondisi sarana dan prasarana, dan isu strategis.

### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

### **BAB IV Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.



## B. PERMASALAHAN UTAMA

Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggungjawab besar untuk menciptakan sebuah pemerintahan daerah yang sesuai dengan mandat dan harapan masyarakat serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Ada pun permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparan, Responsif, Efektif, dan Efesien, perlakuan sama serta kebijakan. Adapun permasalahan yang terjadi urusan Sekretariat Daerah yaitu:

### 1. Permasalahan terkait Bagian Tata Pemerintahan

- a) Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b) Masih belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c) Masih belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d) Belum terinventarisirnya secara optimal data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas eksisting wilayah sesuai kewenangan daerah baik batas atara kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain;
- e) Belum optimal nya kebijakan pembinaan terhadap kecamatan, kelurahan/Desa RT dan RW Kabupaten Bengkayang. Permasalahan terkait Bagian Kesejahteraan Rakyat.

### 2. Permasalahan terkait Bagian Kesejahteraan Rakyat

- a) Belum terinventarisir secara optimal potensi resiko sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial dan keagamaan;
- b) Belum optimalnya rumusan kebijakan bidang budaya, Pendidikan dan Kesehatan;
- c) Belum optimalnya ketersediaan data terkait keberadaan rumah ibadah, organisasi, Lembaga dan ormas keagamaan;
- d) Belum optimalnya inventarisir, verifikasi dan pemberian bantuan di bidang



keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

3. Permasalahan terkait Bagian Hukum
  - a) Masih kurangnya tenaga penyusunan produk hukum dan tenaga teknis publikasi produk hukum;
  - b) Belum optimal nya kebijakan bantuan dan keberpihakan hukum dan HAM bagimasyarakat, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan atau bagi pihak swasta yang mendorong daya saing investasi daerah;
  - c) Masih belum optimal nya monitoring dan evaluasi produk hukum daerah;
  - d) Belum optimal nya informasi dan dokumentasi hukum
4. Permasalahan terkait Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - a) Masih belum optimalnya penataan dan permasalahan perekonomian Pemerintah;
  - b) Kurangnya SDM pengolah data, analis perekonomian dan Analis SDA
  - c) Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan dibidang perekonomian dan SDA pada perangkat daerah terkait;
  - d) Masih belum optimalnya penataan dan permasalahan sumber daya alam Pemerintah daerah;
  - e) Masih belum optimalnya penataan dan permasalahan BUMD dan BLUD daerah.
5. Permasalahan terkait Administrasi Pembangunan
  - a) Belum optimalnya penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik;
  - b) Belum optimalnya kebijakan integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan berbasis elektronik;
  - c) Belum optimalnya kebijakan penataan sistem dan tata cara pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Permasalahan terkait Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  - a) Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  - b) Masih belum optimalnya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;



- c) Belum optimalnya personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan.
7. Permasalahan terkait Bagian Umum
- a) Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian;
  - b) Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
  - c) Belum optimalnya inventarisasi ketatausahaan dan kepegawaian;
  - d) Belum optimalnya pemberian pendistribusian uraian tugas kepada setiap ASN/non ASN;
  - e) Belum optimalnya penegakan disiplin dan penilaian kinerja pegawai.
8. Permasalahan terkait Bagian Organisasi
- a) Belum optimalnya kebijakan teknis terkait analisis jabatan
  - b) Belum belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan publikpada unit pelayanan publik (UPP) Ombudsman;
  - c) Masih belum optimalnya penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan perangkat Daerah;
  - d) Masih rendahnya penilaian zona integritas, reformasi birokrasi, AKIP Kabupaten dan SAKIP OPD, dan pelayanan publik;
  - e) Jumlah dan kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Organisasi,
  - f) Ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja yang belum memadai;
  - g) Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik;
  - h) Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
9. Permasalahan terkait Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- a) Belum optimalnya kebijakan peliputan dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b) Belum optimalnya kebijakan penyampaian informasi dan publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat;
  - c) Belum optimalnya kebijakan pengaturan akomodasi, pengamanan acara tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d) Belum optimalnya kebijakan pengaturan jadwal kegiatan Perangkat



Daerah yang melibatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tugas di lapangan seperti alat komunikasi (HT), baju lapangan, kamera yang sesuai perkembangan zaman dan drone dan laptop serta komputer PC untuk kelancaran pekerjaan administrasi protokol dan komunikasi pimpinan;
- f) Masih terjadi tumpang tindih tupoksi kominfo dan protokol dan komunikasi pimpinan khususnya tugas peliputan dan pelaporan baik internal maupun eksternal.

**10. Permasalahan terkait Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- a) Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah;
- b) Belum optimalnya penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Unit (RKPBU);
- c) Belum optimalnya kebijakan penyusunan dokumen berita acara pemeriksaan, pinjam pakai, penerimaan, penolakan dan pengeluaran barang-barang inventaris;
- d) Belum optimalnya kegiatan inventarisasi aset Sekretariat Daerah sesuai KIB.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program - program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

#### **1. Visi**

Visi adalah kondisi yang di cita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholder) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir





daerah yang dikehendaki oleh stakeholders di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG  
YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYASAING  
DITOPANG PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TERBUKA”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (Partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan sebagai berikut;

**Maju**, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan dan masyarakat kabupaten bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: smart governance (Pengelolaan pemerintahan yang cerdas).

**Mandiri**, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, efisien dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk



mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Sejahtera**, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase Koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat kabupaten yang lebih sejahtera akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi local yang berdaya saing tinggi (2) pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergi tas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

**Berdaya Saing**, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan disuatu daerah dapat berkompetensi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

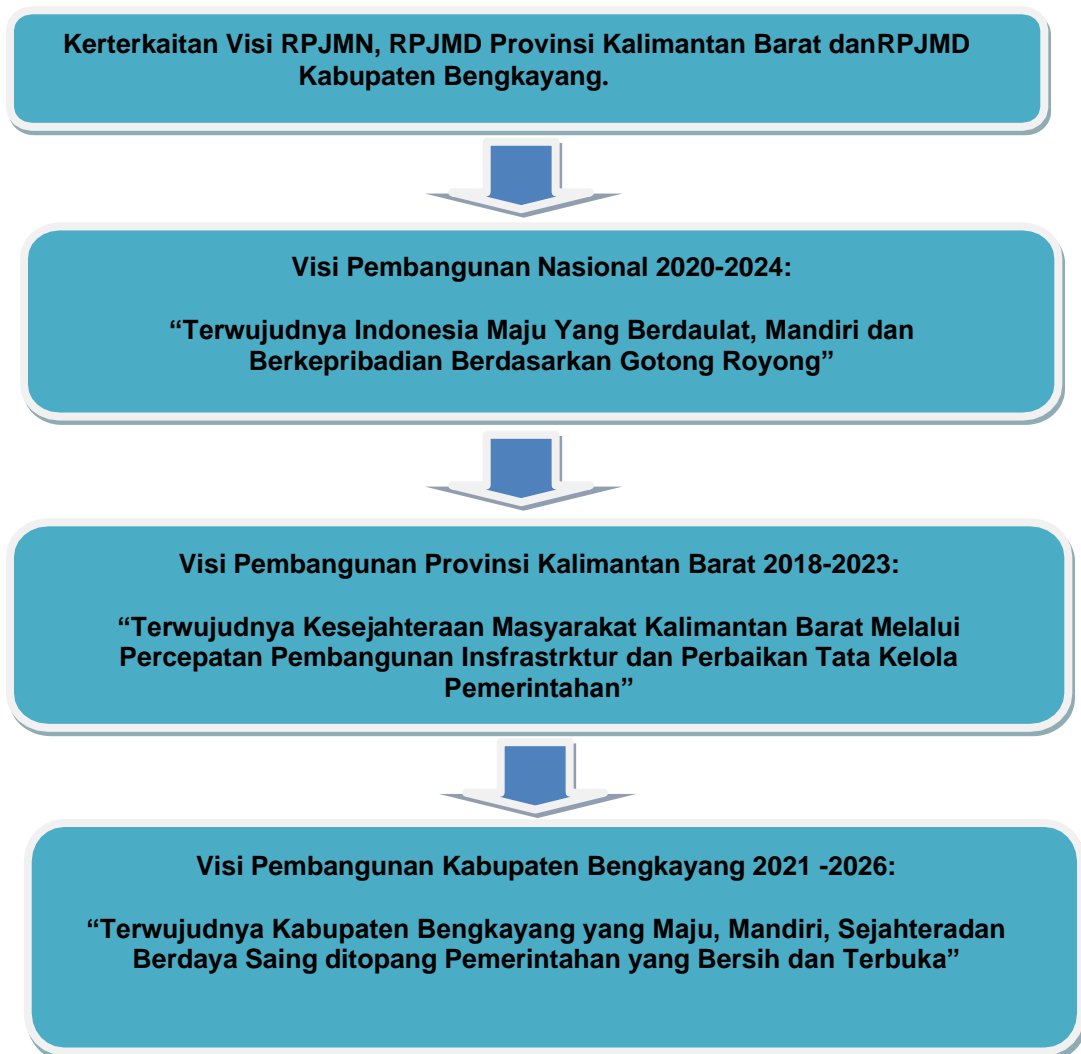
**Pemerintah yang Bersih**, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

**Pemerintahan yang terbuka**, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan



system pengaduan publik yang baik. Visi pembangunan kabupaten bengayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan kabupaten bengayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **Kemajuan Kemandirian, Kesejahteraan dan Daya Saing** yang ingin dicapai.

Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :



## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan



kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan religius.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kabupaten Bengkayang 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Religius.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah, dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologikomunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan optimalisasi pengelolaan dari kemanfaatan Sumber Daya Alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Maju dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang menjadi SMART Desa Tahun 2021-2026 dan Kabupaten Bengkayang Lestari.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Dari tujuh misi tersebut diatas Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan misi 1 dan misi 2 yaitu:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Religius;
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah, dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologikomunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan



dunia usaha dan masyarakat.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategi beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sekretariat Daerah telah menetapkan tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yaitu Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih daripada itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan, makna penetapan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Keagamaan dan Kehidupan Beragama Kemasyarakatan;
3. Meningkatnya Kemitraan Pemerintahan Daerah Dengan Dunia Usaha.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C). Dari tujuan diatas yang telah ditetapkan rumusan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang 2021-2026.

Berdasarkan rumusan visi, misi dan tujuan maka ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2024. Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai



berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat;
3. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha melalui Kerjasama.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai Rencana Strategi (Renstra) 2021-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Adapaun tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
		Nilai Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
		Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Bagian Organisasi
		Nilai Tingkat Disiplin ASN	Bagian Umum
		Tingkat Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi
		Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Perencanaan dan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

			Keuangan dan Bagian Umum
		Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan	Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	Bagian Hukum
		Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	Bagian Pembangunan
		Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan uraian diatas dari visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sesuai Rencana Strategi (Renstra) 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah tahun 2024, sehingga keselarasan dari RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

**Tabel. 2.2**  
**KESELARASAN RPJMD, RENSTRA dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024**

VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	SASARAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024	SUMBER DATA
1	2	3	4		5	6
Terwujudnya Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih dan Terbuka	Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Religius	Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase tingkat capaian Reformasi Birokrasi	-	-
				Tingkat penyelenggaraan administrasi perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Bagian Umum
				Nilai Tingkat Disiplin ASN	Nilai Tingkat Disiplin ASN	Bagian Umum
				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi
				Nilai Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
				Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Bagian Organisasi
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan	Meningkatkan Kualitas Keagamaan dan kehidupan beragama kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan	Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat





## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024

	berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat			Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan.	Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
				Tingkat Regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	Bagian Hukum
		Meningkatnya kemitraan pemerintahan daerah dengan Dunia Usaha	Meningkatnya nya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama	Tingkat Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR	Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Tingkat pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pengadaan yang terlaksana	Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	Bagian Pembangunan



## **Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA – SKPD).

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 seperti dibawah ini:



## **PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211  
Situs : [bengkayangkab.go.id](http://bengkayangkab.go.id)

---

### **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSTIANUS, S.E., M.M.  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.  
Jabatan : Bupati Bengkayang  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkayang, 30 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M.

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS DAERAH  
KAB. BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19691116 200003 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Keagamaan dan kemasyarakatan	1	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Sedang
		2	Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	100%
		3	Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	100%
2	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama	1	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	Tinggi
		2	Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	100%
		3	Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	100%
3	Meningkatnya kualitas dan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

sinergisitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	Nilai Pelayanan Publik	B
	3	Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang	B
	4	Nilai Tingkat Disiplin ASN	Sedang
	5	Tingkat Kepuasan Masyarakat	B
	6	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%
	7	Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan	100%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	:	Rp. 5.845.273.770	APBDP
2	Program Perekonomian Pembangunan	:	Rp. 892.367.700	APBDP
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp. 26.175.973.015	APBDP
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 32.913.614.485</b>	

Untuk pencapaian target Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 diimplementasikan melalui 3 (tiga) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 kegiatan antara lain:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



- i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - j. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
  - k. Penataan Organisasi;
  - l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari 3 kegiatan antara lain:
  - a. Administrasi Tata Pemerintahan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Fasilitas dan Koordinasi Hukum.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari 4 kegiatan antara lain:
  - a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
  - b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
  - c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Untuk lebih rinci untuk program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
04.01.00 'SEKRETARIAT DAERAH	
01.00.00 'SEKRETARIAT DAERAH	32.913.614.485
04.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.175.973.015
4.01.01.2.01.00 'Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.405.660



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024**

4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.902.500
4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.480.000
4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.145.000
4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.326.000
4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.541.160
4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.671.000
4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.340.000
<b>4.01.01.2.02.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.168.905.541</b>
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.122.206.041
4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.303.000
4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.295.000
4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.021.500
4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.838.000
4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.242.000
<b>4.01.01.2.03.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>184.204.100</b>
4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.621.000
4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.649.000
4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.590.500
4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-
4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	122.491.000
4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	39.852.600
<b>4.01.01.2.06.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.415.795.750</b>
4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	142.928.000



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024**

4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.489.200
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.372.500
4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.780.000
4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	512.310.000
4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.341.050
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.116.000
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.031.459.000
4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-
4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.000.000
<b>4.01.01.2.08.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.565.243.538</b>
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.163.938.314
4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.750.836.432
4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.468.792
<b>4.01.01.2.11.00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>659.221.625</b>
4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	85.200.000
4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.021.625
4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000
<b>4.01.01.2.12.00 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.170.496.000</b>
4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	561.600.000
4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	381.600.000
4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	227.296.000



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024**

<b>4.01.01.2.05.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.548.000</b>
4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-
4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.560.000
4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.988.000
<b>4.01.01.2.07.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.049.747.501</b>
4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.375.000
4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	13.000.000
4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.021.200
4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.351.301
<b>4.01.01.2.09.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>897.536.300</b>
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	620.428.300
4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.000.000
4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	-
4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.108.000
4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
<b>4.01.01.2.13.00 Penataan Organisasi</b>	<b>388.806.000</b>
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	131.771.000
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	89.034.000
4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.830.000
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.784.000
4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.387.000
<b>4.01.01.2.14.00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>560.063.000</b>





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024**

4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	104.166.000
4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	100.396.000
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	355.501.000
<b>4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>5.845.273.770</b>
<b>4.01.02.2.01.00 Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>981.799.900</b>
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	693.818.100
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	37.108.960
4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	250.872.840
<b>4.01.02.2.02.00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>4.402.033.300</b>
4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.283.528.300
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100.749.000
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	17.756.000
<b>4.01.02.2.03.00 Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>	<b>461.440.570</b>
4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	136.596.600
4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	181.012.970
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	143.831.000
<b>4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>892.367.700</b>
<b>4.01.03.2.01.00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>76.332.800</b>
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	39.398.800
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	23.703.000
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	13.231.000
<b>4.01.03.2.04.00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>465.543.200</b>
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	396.614.000



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	34.006.200
4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	34.923.000
<b>4.01.03.2.02.00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>70.611.900</b>
4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	30.189.000
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	14.353.000
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	26.069.900
<b>4.01.03.2.03.00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>279.879.800</b>
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	178.971.100
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	38.526.900
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	62.381.800



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatannya. adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010



Capaian kinerja secara menyeluruh Sekretariat Daerah tahun 2024, berdasarkan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah sesuai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis ini dilakukan dapat mengetahui agar masalah di Sekretariat Daerah pada setiap kriteria indikator capaian kinerja yang dibuat. Hasil dari analisis capaian kinerja yang dilakukan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan organisasi. Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  - a. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya
  - b. Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:**

**Tabel. 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024**  
**Sekretariat Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan sinergi tas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	Nilai belum keluar	0%
		Nilai Pelayanan Publik	B	B (3,22)	100%
		Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang	B	B	100%
		Nilai Tingkat Disiplin ASN	Sedang	Sedang	100%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

		Tingkat Kepuasan Masyarakat	B	B (83,25)	100%
		Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Sedang	Nilai belum keluar	0%
		Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	100%	111%	111%
		Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	100%	100%	100%
		Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	70%	70%	100%
		Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	100%	100%	100%
		Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	100%	94%	94%

Tabel diatas menyajikan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024. Pada Capaian Indikator Tahun 2024 menghasilkan capaian kinerja rata-rata sebesar 85,23%. Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024 ini belum menghasilkan nilai keseluruhan, dikarenakan masih ada indikator kinerja yang belum menghasilkan nilai capaian seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai LPPD Pemerintah Daerah. Berikut adalah penjabaran masing-masing sasaran strategis dan indikatornya:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Indeks Reformasi Birokrasi

- Target: CC



- Realisasi: Nilai belum keluar
- Capaian: 0%

Penjelasan: Hingga pada saat ini nilai indeks RB belum dapat disajikan karena Tim Penilai Pusat masih dalam proses evaluasi. Namun, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyusun road map Rb, Rencana Aksi, Capaian dan laporan pelaksanaan RB dan telah diinput secara keseluruhan dalam aplikasi Portal Rb.

## **2. Nilai Pelayanan Publik**

- Target: B
- Realisasi: 81,3 (B) Zona hijau kualitas tinggi
- Capaian: 100%

Penjelasan: Persentase nilai pelayanan publik mencapai target, hal ini tidak lepas dari kerjasama tim pelayanan publik baik dari Pimpinan, tim bagian organisasi dan tim pada perangkat daerah lokus penilaian yaitu koordinasi yang intens serta pendampingan langsung kepada perangkat daerah lokus yang di nilai.

## **3. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

- Target: B
- Realisasi: B
- Capaian: 100%



Penjelasan: Secara umum nilai Sakip dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai target yang diharapkan. Namun masih terdapat peluang untuk ditingkatkan. Adapun hal utama yang menyebabkan nilai tidak bisa melebihi target adalah rendahnya komponen perencanaan di kabupaten Bengkayang.

#### 4. Nilai Tingkat Disiplin ASN

- Target: Sedang
- Realisasi: Sedang
- Capaian: 100%

Penjelasan: secara umum nilai tingkat disiplin ASN dikatakan berhasil karena telah mencapai target. Namun secara umum masih terdapat tingkat kehadiran ASN belum tepat waktu .

#### 5. Tingkat Kepuasan Masyarakat

- Target: B
- Realisasi: B (83,25)
- Capaian: 100%

Penjelasan: Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat, ini tidak lepas dari upaya tim bagian organisasi melakukan asistensi kepada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik serta kerjasama tim survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang intens melakukan koordinasi ke bagian organisasi.



**6. Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran**

- Target: 100%
- Realisasi: 100%
- Capaian: 100%

Penjelasan: Persentase persentase penyelenggaraan administrasi kantor mencapai target hal ini di dukung dengan kelengkapan dokumen, keakuratan dokumen, ketepatan waktu pengelolaan dokumen, kualitas pengelolaan dokumen dan tingkat kepuasan penggunaan jasa administrasi.

**7. Persentase Penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

- Target: 100%
- Realisasi: 100%
- Capaian: 100%

Penjelasan: Persentase persentase penyelenggaraan protokol dan komunikasi pimpinan mencapai target hal ini di dukung dengan jumlah kegiatan yang telah tercapai dengan total jumlah target kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan target.

**Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Keagamaan dan Kemasyarakatan**

**1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah**

- Target: Sedang
- Realisasi: 0
- Capaian: 0%





Penjelasan: untuk nilai LPPD Pemerintah Daerah tahun 2024 belum mencapai target hal ini dikarenakan nilai belum keluar (SK).

**2. Persentase regulasi yang ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang**

- Target: 100%
- Realisasi: 111%
- Capaian: 111%

Penjelasan: bahwa regulasi yang ditetapkan berdasarkan amanat undang-undang telah berhasil menetapkan regulasi yang melebihi target yang ditetapkan, dan capaian regulasi yang ditetapkan juga melebihi target yang ditetapkan.

**3. Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan**

- Target: 100%
- Realisasi: 100%
- Capaian: 100%

Penjelasan: tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan telah mencapai target yang ditetapkan, dan capaian tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan adalah 100%. Ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan telah dilakukan dengan kualitas yang optimal.

**Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah serta Kemitraan dengan Dunia Usaha.**

**1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha**



- Target: 100%
- Realisasi: 100%
- Capaian: 100%

Penjelasan: Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha telah mencapai target yang ditetapkan, dan capaian tingkat kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha adalah 100%. Ini menunjukkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha telah dilakukan dengan tingkat yang optimal.

2. Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan

- Target: 100%
- Realisasi: 100%
- Capaian: 100%

Penjelasan: persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan telah mencapai 100%, yang berarti semua OPD telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

3. Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana

- Target: 100%
- Realisasi: 94%
- Capaian: 94%



Penjelasan: persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana telah mencapai 94%, namun masih ada 6% paket pengadaan yang belum terlaksana. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan persentase paket pengadaan yang terlaksana.

Dari uraian diatas ada capaian kinerja yang melebihi/melampaui target, sesuai target dan yang belum mencapai target adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi / melampaui target ditunjukan pada indikator Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang, dengan capaian 111%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Pelayanan Publik, dengan capaian kinerja 100%;
2. Indikator Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan capaian kinerja 100%;
3. Indikator Nilai Tingkat Disiplin ASN, dengan capaian kinerja 100%;
4. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100%;
5. Indikator Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran, dengan capaian kinerja 100%;
6. Indikator Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan, dengan capaian kinerja 100%;
7. Indikator Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan, dengan capaian kinerja 100%;
8. Indikator Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan, dengan capaian kinerja 100%;
9. Indikator Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha, dengan capaian kinerja 100%;
10. Indikator Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwula, dengan capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja yang belum sesuai target atau dibawah 100% ditunjukan pada



indikator antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana, dengan capaian kinerja 94%.

Capaian kinerja yang belum ada nilai nya di tunjukan pada indikator antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi, belum ada capaian kinerja dikarenakan Surat Keputusan (SK) belum keluar;
2. Indikator Nilai LPPD Pemerintah Daerah, belum ada capaian kinerja dikarenakan Surat Keputusan (SK) belum keluar.



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel.3.3**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2024			Capaian kinerja %	Tingkat Efisiensi %
			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Rp)	%		
			32.913.614.485	28.115.135.950	85,42%		
Meningkatnya kualitas dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.175.973.015	25.186.173.679	96,22%	88,89%	7,33%
		Persentase tingkat capaian Reformasi Birokrasi					
		Tingkat penyelenggaraan administrasi perkantoran					
		Nilai Tingkat Disiplin ASN					
		Indeks Reformasi Birokrasi					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					
		Nilai Pelayanan Publik					
		Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkayang					



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

	<b>Tingkat penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>	<b>25.203.556.015</b>	<b>24.234.150.819</b>	<b>96,15%</b>	<b>100%</b>	<b>-3,85%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Ketersediaan Laporan Kinerja perangkat Daerah</b>	<b>92.405.660</b>	<b>82.492.050</b>	<b>89,27%</b>	<b>100%</b>	<b>-10,73%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.902.500,00	39.521.800	92,12%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.480.000,00	1.658.000	66,85%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.145.000,00	2.554.500	49,65%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	12.326.000,00	11.556.200	93,75%		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.541.160,00	5.929.050	90,64%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.671.000,00	7.833.200	90,34%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.340.000,00	13.439.300	93,72%		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.168.905.541</b>	<b>10.755.352.141</b>	<b>96,30%</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.122.206.041,00	10.715.666.691	96,34%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.838.000,00	10.524.800	88,91%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.303.000,00	8.217.050	79,75%		



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	9.242.000,00	7.923.000	85,73%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.295.000,00	3.305.500	76,96%		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.021.500,00	9.715.100	88,15%		
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Ketersediannya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>144.351.500</b>	<b>137.016.570</b>	<b>94,92%</b>		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.621.000,00	13.894.500	95,03%		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0,00%		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1.649.000,00	1.248.000	75,68%		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.590.500,00	5.319.400	95,15%		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	122.491.000,00	116.554.670	95,15%		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.455.648.350</b>	<b>3.359.112.979</b>	<b>97,21%</b>		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	142.928.000,00	135.265.000	94,64%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	183.341.050,00	169.335.000	92,36%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	84.489.200,00	80.049.000	94,74%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	324.372.500,00	315.895.400	97,39%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72.116.000,00	72.109.000	99,99%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9.780.000,00	7.506.000	76,75%		



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	39.852.600,00	-	0,00%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	512.310.000,00	502.696.900	98,12%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.031.459.000,00	2.031.456.679	100,00%		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	"Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	-	-	0,00%		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.000.000,00	44.800.000	81,45%		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaannya Barang Milik Daerah</b>	<b>1.049.747.501</b>	<b>1.047.750.000</b>	<b>99,81%</b>		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	600.375.000,00	600.300.000	99,99%		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13.000.000,00	12.750.000	98,08%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	358.021.200,00	358.000.000	99,99%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	78.351.301,00	76.700.000	97,89%		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa umum dan pelayanan sebagai penunjang dalam urusan pemerintahan</b>	<b>6.565.243.538</b>	<b>6.329.055.989</b>	<b>96,40%</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	0,00%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.163.938.314,00	1.060.524.257	91,12%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	650.468.792,00	640.285.500	98,43%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.750.836.432,00	4.628.246.232	97,42%		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Kondisi Barang Milik Daerah yang terjaga dan terpelihara dengan baik</b>	<b>897.536.300</b>	<b>796.148.900</b>	<b>88,70%</b>		





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	620.428.300,00	562.803.000	90,71%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67.000.000,00	63.445.900	94,70%		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	0,00%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210.108.000,00	169.900.000	80,86%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	0,00%		
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Ketersediaannya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>659.221.625</b>	<b>597.308.690</b>	<b>90,61%</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.021.625,00	152.408.690	87,58%		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	85.200.000,00	78.900.000	92,61%		
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	366.000.000	91,50%		
<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Ketersediannya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.170.496.000</b>	<b>1.129.913.500</b>	<b>96,53%</b>		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	561.600.000,00	554.953.500	98,82%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	381.600.000,00	356.693.000	93,47%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	227.296.000,00	218.267.000	96,03%		



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.548.000</b>	<b>19.750.011</b>	<b>83,87%</b>		
	<b>Tingkat Disiplin ASN</b>	<b>23.548.000</b>	<b>19.750.011</b>	<b>83,87%</b>	<b>100%</b>	<b>-16,13%</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0,00%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.560.000,00	-	0,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.988.000,00	19.750.011	94,10%		
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik</b>	<b>388.806.000</b>	<b>372.485.937</b>	<b>95,80%</b>	<b>100%</b>	<b>-4,20%</b>
	<b>Persentase tingkat capaian Reformasi Birokrasi</b>					
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>					
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>					
	<b>Nilai Pelayanan Publik</b>					
	<b>Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkayang</b>					
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	131.771.000,00	127.204.558	96,53%		
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.784.000,00	67.790.600	98,56%		
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>200.555.000,00</b>	<b>194.995.158,00</b>	<b>97,55%</b>	<b>100%</b>	<b>-2,45%</b>
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	89.034.000,00	85.635.979	96,18%		
	<b>Persentase tingkat capaian Reformasi Birokrasi</b>					
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>89.034.000,00</b>	<b>85.635.979</b>	<b>96,18%</b>	<b>0%</b>	<b>96,18%</b>
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.387.000,00	37.700.200	98,21%		98,21%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

		<b>Nilai Pelayanan Publik</b>	<b>38.387.000,00</b>	<b>37.700.200</b>	<b>98,21%</b>	<b>100%</b>	<b>-1,79%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.830.000,00	54.154.600	89,03%		
		<b>Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkayang</b>	60.830.000,00	<b>54.154.600</b>	<b>89,03%</b>	<b>100%</b>	<b>-10,97%</b>
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi</b>	<b>560.063.000</b>	<b>559.786.912</b>	<b>99,95%</b>		
		<b>Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan</b>	<b>560.063.000</b>	<b>559.786.912</b>	<b>99,95%</b>	<b>100%</b>	<b>-0,05%</b>
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	104.166.000,00	103.993.738	99,83%		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100.396.000,00	100.354.915	99,96%		
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	355.501.000,00	355.438.259	99,98%		99,98%
<b>Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu; Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra; Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif</b>	<b>5.845.273.770</b>	<b>2.070.495.156</b>	<b>35,42%</b>	<b>77,75%</b>	<b>-42,33%</b>
		<b>Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan</b>					
		<b>Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan</b>					



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

		Nilai LPPD Pemerintah Daerah					
		Tingkat Regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang					
	Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan secara efisien dan efektif serta penyelenggaraan pemerintahan umum yang berkualitas	981.799.900	959.186.670	97,70%		
		Nilai LPPD Pemerintah Daerah	981.799.900	959.186.670	97,70%	0%	97,70%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	693.818.100,00	689.112.545	99,32%		
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	37.108.960,00	35.459.100	95,55%		
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	250.872.840,00	234.615.025	93,52%		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian	4.402.033.300	653.717.638	14,85%		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.283.528.300,00	536.529.219	12,53%		
		Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan	4.283.528.300	536.529.219	12,53%	100%	-87,47%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.	100.749.000,00	99.605.519	98,87%		



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.	17.756.000,00	17.582.900	99,03%		
		<b>Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan</b>	<b>118.505.000,00</b>	<b>117.188.419,00</b>	<b>98,95%</b>	<b>100%</b>	<b>-1,05%</b>
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>461.440.570</b>	<b>457.590.848</b>	<b>99,17%</b>		
		<b>Tingkat Regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang</b>	<b>461.440.570</b>	<b>457.590.848</b>	<b>99,17%</b>	<b>111%</b>	<b>-11,83%</b>
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	136.596.600,00	133.671.715	97,86%		
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	181.012.970,00	180.619.450	99,78%		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	143.831.000,00	143.299.683	99,63%		
<b>Meningkatnya nya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan;</b>	<b>892.367.700</b>	<b>858.467.115</b>	<b>96,20%</b>	<b>97%</b>	<b>-0,80%</b>
		<b>Persentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan</b>					
		<b>Tingkat Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha</b>					
		<b>Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR</b>					
		<b>Tingkat pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pengadaan yang terlaksana</b>					



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

		<b>Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Terlaksananya Kebijakan Pemerintah di bidang Perekonomian</b>	<b>76.332.800</b>	<b>68.886.500</b>	<b>90,24%</b>			
	<b>Tingkat Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha</b>	<b>76.332.800</b>	<b>68.886.500</b>	<b>90,24%</b>	<b>100%</b>	<b>-9,76%</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	39.398.800,00	33.369.700	84,70%			
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	23.703.000,00	23.699.700	99,99%			
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	13.231.000,00	11.817.100	89,31%			
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Administrasi dan Pelaporan di bidang Pembangunan</b>	<b>70.611.900</b>	<b>66.821.159</b>	<b>94,63%</b>			
	<b>Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>70.611.900</b>	<b>66.821.159</b>	<b>94,63%</b>	<b>100%</b>	<b>-5,37%</b>	
	<b>Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan;</b>	<b>70.611.900</b>	<b>66.821.159</b>	<b>94,63%</b>	<b>100%</b>	<b>-5,37%</b>	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	30.189.000,00	29.004.528	96,08%			
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian	14.353.000,00	14.332.116	99,85%			
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	26.069.900,00	23.484.515	90,08%			



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>279.879.800</b>	<b>266.126.846</b>	<b>95,09%</b>	<b>94%</b>	<b>1,09%</b>
		<b>Persentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan</b>					
		<b>Tingkat pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pengadaan yang terlaksana</b>					
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	178.971.100,00	169.879.850	94,92%		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	38.526.900,00	37.773.286	98,04%		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	62.381.800,00	58.473.710	93,74%		
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.</b>	<b>465.543.200</b>	<b>456.632.610</b>	<b>98,09%</b>		
		<b>Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR</b>	<b>465.543.200</b>	<b>456.632.610</b>	<b>98,09%</b>	<b>88%</b>	<b>10,09%</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	396.614.000,00	393.917.610	99,32%		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	34.006.200,00	30.919.700	90,92%		



	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	34.923.000,00	31.795.300	91,04%		
--	--	---	---------------	------------	--------	--	--

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan kegiatan melalui APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 51.263.322.703,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 jumlah anggaran menjadi Rp. 32.913.614.485,- Untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) Program adalah sebagai berikut :





1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Rp. 26.175.973.015
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Rp. 5.845.273.770
3. Program Perekonomian Pembangunan : Rp. 892.367.700

Berikut rincian efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas dan sinergi tas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Penataan Organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebesar Rp.89.034.000,- dengan realisasi sebesar Rp.85.635.979,- atau 96,18%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 0%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar 96,18%.

2. Predikat/Indeks SPBE

Indikator Kinerja ini pada indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah tahun 2024 tidak ada tetapi pada indikator sasaran strategis (RENSTRA) 2022-2026 sehingga program/kegiatan pendukung indikator ini tidak bisa diuraikan.

3. Nilai Pelayanan Publik

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Penataan Organisasi sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebesar Rp.38.387.000,- dengan realisasi sebesar Rp.37.700.200,- atau 98,21%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung



indikator kinerja ini adalah sebesar -1,79%.

**4. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Penataan Organisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebesar Rp.60.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp.54.154.600,- atau 89,03%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -10,97%.

**5. Tingkat Disiplin ASN**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator tingkat disiplin ASN sebesar Rp.23.648.000,- dengan realisasi sebesar Rp.19.750.011,- atau 83,87%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -16,13%.

**6. Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Penataan Organisasi sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat sebesar Rp.200.555.000,- dengan realisasi sebesar Rp.194.995.158,- atau 97,55%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -2,45%.

**7. Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan



Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil dan Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator tingkat penyelenggaraan administrasi perkantoran sebesar Rp.25.203.556.015,- dengan realisasi sebesar Rp.24.234.150.189,- atau 96,15%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -3,85%.

**8. Persentase Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan sebesar Rp.560.063.000,- dengan realisasi sebesar Rp.559.786.912,- atau 99,95%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -0,05%.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat.

**9. Nilai LPPD Pemerintah Daerah**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai LPPD Pemerintah Daerah sebesar Rp.981.799.900,- dengan realisasi sebesar Rp.959.186.670,- atau 97,70%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 0%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar 97,70%. Hal ini dikarenakan Surat Keputusan (SK) untuk indikator kinerja ini belum ada.

**10. Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja



Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Daerah sebesar Rp.461.440.570,- dengan realisasi sebesar Rp.457.590.848,- atau 99,17%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -11,83%.

**11. Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan**

Indikator Kinerja ini pada indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah tahun 2024 tidak ada tetapi pada indikator sasaran strategis (RENSTRA) 2022-2026 sehingga program/kegiatan pendukung indikator ini tidak bisa diuraikan.

**12. Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan sebesar Rp.118.505.000,- dengan realisasi sebesar Rp.117.188.419,- atau 98,95%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -1,05%.

**Sasaran Strategis 3 Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama**

**13. Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha sebesar Rp.76.332.800,- dengan realisasi sebesar Rp.68.886.500,- atau 90,24%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -9,76%.



**14. Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR**

Indikator Kinerja ini pada indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah tahun 2024 tidak ada tetapi pada indikator sasaran strategis (RENSTRA) 2022-2026 sehingga program/kegiatan pendukung indikator ini tidak bisa diuraikan.

**15. Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan sebesar Rp.70.611.900,- dengan realisasi sebesar Rp.66.821.159,- atau 94,63%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar -5,37%.

**16. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja ini pada indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah tahun 2024 tidak ada tetapi pada indikator sasaran strategis (RENSTRA) 2022-2026 sehingga program/kegiatan pendukung indikator ini tidak bisa diuraikan.

**17. Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana**

Indikator Kinerja ini didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana sebesar Rp.279.879.800,- dengan realisasi sebesar Rp.266.126.846,- atau 95,09%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar 1,09%.

**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran**

Keberhasilan atas pencapaian Sasaran Strategis pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah adalah tidak terlepas dari



pelaksanaan Program/Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala dan Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang merupakan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 8 (delapan) indikator antara lain: Indeks Reformasi Birokrasi, Predikat/Indeks SPBE, Nilai Pelayanan Publik, Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Nilai Tingkat Disiplin ASN, Tingkat Kepuasan Masyarakat, Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran, dan Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan. Dengan memanfaatkan program kegiatan yang ada, melalui penggunaan anggaran yang seefisien mungkin dengan realisasi anggaran 96,22% capaian kinerja rata-rata 87,50% dengan tingkat efisiensi -8,72%. Ini mengindikasikan bahwa program kegiatan ini belum terlalu baik dan belum efektif serta belum efisien dalam menunjang upaya pencapaian kinerja organisasi karena ada salah satu indikator capaian Indeks Reformasi Birokrasi belum ada nilai dikarenakan Surat Keputusan (SK) belum keluar. Untuk kedepannya berharap semoga sasaran strategis ini untuk lebih di tingkat kan lagi dan bahkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan



Rakyat, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang merupakan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat dengan 4 (empat) indikator antara lain: Nilai LPPD Pemerintah Daerah, Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang, Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan dan Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan. Dengan memanfaatkan program kegiatan yang ada, melalui penggunaan anggaran yang seefisien mungkin dengan realisasi anggaran 35,42% capaian kinerja 77,75% dengan tingkat efisiensi 42,33%. Ini mengindikasikan bahwa program kegiatan ini belum terlalu baik dan belum efektif serta belum efisien dalam menunjang upaya pencapaian kinerja organisasi. karena ada salah satu indikator capaian Nilai LPPD Pemerintah Daerah belum ada nilai dikarenakan Surat Keputusan (SK) belum keluar. Untuk kedepannya berharap semoga sasaran strategis ini untuk lebih di tingkat kan lagi dan bahkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

3. Program Perekonomian dan pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang merupakan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya nya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan dengan 4 (empat) indikator antara lain: Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha, Persentase perusahaan yang melaksanakan CSR, Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan dan Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana. Dengan memanfaatkan program kegiatan yang ada, melalui penggunaan anggaran yang seefisien mungkin dengan realisasi anggaran 96,20% capaian kinerja rata-rata 94% dengan tingkat efisiensi -0,80%. Ini mengindikasikan bahwa program kegiatan sudah baik dan efektif serta efisien dalam menunjang upaya pencapaian kinerja organisasi. Untuk kedepannya berharap semoga



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

sasaran strategis ini untuk di pertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

**4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 yang telah disepakati, dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta persentase capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Adapun dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Persentase  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024  
dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2022 (%)	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas dan sinergi tas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B (55,59)	Nilai belum keluar	66,67%	92,65%	0%
		Predikat/Indeks SPBE	C	C (2,46)	-	100%	102,50%	0%
		Nilai Pelayanan Publik	0	C (70,49)	B (81,3)	0%	100,70%	100%
		Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang	B	B (60,90)	B	100%	101,50%	100%
		Nilai Tingkat Disiplin ASN	Sedang	Tinggi (91,31%)	Sedang	100%	113,43%	100%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat	B	B (81,80)	B (83,25)	100%	102,25%	100%
		Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	0	101,63%	100%	0%	101,63%	100%
		Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan	0	0%	100%	0%	0%	100%
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Tinggi	Sedang (2,6460)	Nilai belum keluar	100%	132,30%	0%





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

	kesejahteraan rakyat	Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	100%	107,74%	111%	100%	107,74%	111%
		Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan	0	100,00%	0%	0%	100%	0%
		Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	Sedang	Tinggi (100%)	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	100%	Tinggi (141,38%)	100%	100%	141,38%	100%
		Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	n/a	19,54%	0%	0%	488,50%	0%
		Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	0	0%	100%	0%	0%	100%
		Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	109,90%	0%	100%	109,90%	0%
		Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	96,48%	129%	94%	100%	129%	94%

Tabel diatas menjelaskan Tingkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 Keseluruhan Indikator mengalami kenaikan realisasi kinerja dari Tahun 2022 dan Tahun 2023. terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai LPPD Pemerintah Daerah yang belum menghasilkan nilai dikarenakan untuk indikator ini masih dalam proses penilaian. Walaupun keseluruhan indikator mengalami kenaikan realisasi kinerja, untuk Persentase Capaian Kinerja nya sebagian indikator mengalami penurunan Persentase Capaian Kinerja.

Terdapat 1 (satu) indikator yang Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerjanya mengalami kenaikan, 3 (tiga) indikator yang Realisasi Kinerjanya mengalami kenaikan namun Persentase Capaian Kinerjanya mengalami penurunan, 5 (lima) indikator yang realisasi kinerja dan capaian kinerja mengalami penurunan, 2 (dua) indikator yang Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 belum menghasilkan nilai sehingga belum dapat



dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 6 (enam) indikator yang Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Kinerja Dan Persentase Capaian Kinerja Mengalami Kenaikan
  1. Indikator Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang
- b. Realisasi Kinerja Mengalami Kenaikan Dan Persentase Capaian Kinerja Mengalami Penurunan
  1. Indikator Pelayanan Publik
  2. Indikator Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang
  3. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat
- c. Realisasi Kinerja Dan Persentase Capaian Kinerja Mengalami Penurunan
  1. Indikator Nilai Tingkat Disiplin ASN
  2. Indikator Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran
  3. Indikator Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan
  4. Indikator Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha
  5. Indikator Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana
- d. Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 Tidak Dapat Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
  1. Indikator Predikat/Indeks SPBE
  2. Indikator Persentase penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan
  3. Indikator Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan
  4. Indikator Persentase perusahaan yang melakukan CSR
  5. Indikator Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulanan
  6. Indikator Persentase caapaian kinerja Perangkat Daerah
- e. Realisasi Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 Belum Menghasilkan Nilai Sehingga Belum Dapat Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
  1. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
  2. Indikator Nilai LPPD Pemerintah Daerah



## 5. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022, 2023, 2024 dan target Renstra

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 yang telah disepakati, dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta persentase capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Renstra. Adapun dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel. 3.5**  
**Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022, 2023 ,2024**  
**dan target Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target Renstra 2024
			2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan sinergi tas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B (55,59)	Belum Keluar	BB
		Predikat/Indeks SPBE	C	C (2,46)	-	B
		Nilai Pelayanan Publik	0	C (70,49)	B	B
		Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	B	B (60,90)	B	BB
		Nilai Tingkat Disiplin ASN	Sedang	Tinggi (91,31%)	Sedang	B
		Tingkat Kepuasan Masyarakat	B	B (81,80)	B	B
		Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	0	101,63%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan	0	0%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Tinggi	Sedang (2,6460)	Belum Keluar	Tinggi
		Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	100%	107,74%	111%	77%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

		Tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan	0	100,00%	100%	100%
		Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	Sedang	Tinggi (100%)	100%	60%
3	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	100%	Tinggi (141,38%)	100%	100%
		Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	n/a	19,54%	70%	80%
		Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	0	0,00%	100%	70%
		Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	109,90%	89,87 %	BB
		Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	96,48%	129%	94%	60%

Tabel diatas menjelaskan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Renstra. Pada Tahun 2024 Keseluruhan Indikator mengalami kenaikan realisasi kinerja dari Tahun 2022, Tahun 2023 dan Target Renstra. Berikut rincian perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Renstra, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**1. Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi**

- Realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi dengan kategori “B”(Baik) dan dibandingkan dengan target Renstra “BB”;
- Realisasi kinerja tahun 2024 belum ada nilai keluar sehingga belum bisa dibandingkan dengan Target Renstra “BB”;

Dengan demikian bahwa realisasi kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan



realisasi tahun 2023 dan target Renstra BB, realisasi tahun 2024 belum bisa dibandingkan dengan target Renstra BB, sehingga realisasi kinerja tahun 2024 belum ada dan perlu diawasi untuk mencapai target Renstra BB.

## **2. Realisasi kinerja Predikat/Indeks SPBE**

- Realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 sama-sama mencapai nilai C (cukup).
- Target Renstra B untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 sama-sama mencapai nilai C (cukup).
- Realisasi kinerja tahun 2024 belum ada, karena tidak masuk dalam indikator kinerja tahun 2024, untuk tahun 2025 akan dimasukkan kembali dalam indikator kinerja sehingga dapat dibandingkan dengan target Renstra B.

Dengan demikian bahwa realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 belum mencapai target Renstra B, hal ini dikarenakan indikator kinerja dimaksud tidak masuk ke dalam indikator kinerja tahun 2024 namun pada tahun 2025 indikator kinerja tersebut akan dimasukkan kembali sehingga bisa mencapai target Renstra B.

## **3. Realisasi Kinerja Nilai Pelayanan Publik**

- Realisasi kinerja tahun 2022 tidak ada, sehingga tidak dapat mencapai target Renstra B (baik);
- Realisasi kinerja tahun 2023 mencapai nilai C (cukup), namun belum mencapai target Renstra B (baik);
- Realisasi kinerja tahun 2024 mencapai nilai B (baik), sehingga mencapai target Renstra B.

Dengan demikian realisasi kinerja tahun 2022,2023 belum mencapai target Renstra B (baik), realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai target Renstra B (baik), sehingga terdapat peningkatan realisasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa kinerja semakin baik.



**4. Realisasi Kinerja Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

- Realisasi kinerja tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 sama-sama mencapai nilai B (baik)
- Target renstra BB untuk tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 telah melebihi target;

Dengan demikian realisasi kinerja tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 telah melebihi target Renstra BB, untuk tahun kedepannya dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi.

**5. Realisasi Kinerja Nilai Tingkat Disiplin ASN**

- Realisasi kinerja indikator nilai tingkat disiplin ASN tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 sama-sama mencapai nilai “Sedang”;
- Target Renstra untuk tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2023 sama-sama mencapai nilai “Sedang”;
- Realisasi kinerja indikator nilai tingkat disiplin ASN tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 telah mencapai target Renstra.

Dengan demikian realisasi kinerja indikator nilai disiplin ASN tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai target Renstra, capain kinerja indikator nilai disiplin ASN telah konsisten stabil selama 3 tahun, namun masih perlu ditingkatkan nilai yang lebih baik lagi dan perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan nilai tingkat disiplin ASN pada tahun depan.

**6. Realisasi kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat**

- Realisasi kinerja indikator tingkat kepuasan masyarakat tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 sama-sama mencapai nilai “B (Baik)”;
- Target Renstra untuk tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2023 sama-sama mencapai nilai “B (Baik)”;
- Realisasi kinerja indikator tingkat kepuasan masyarakat tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 telah mencapai target Renstra.

Dengan demikian realisasi kinerja indikator tingkat kepuasan masyarakat tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai target Renstra BB,



capaian kinerja telah konsisten stabil selama 3 tahun, menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat namun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat untuk tahun kedepannya.

**7. Realisasi kinerja Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran**

- o Ralisasi capaian kinerja tahun 2022 tidak ada karena tidak masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) sehingga tidak ada nilainya”;
- o Realisasi capaian kinerja tahun 2023 melebihi target Renstra 10163%”;
- o Realisasi capaian kinerja tahun 2024 mencapai target Resntra 100%.

Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk tahun 2022 tidak ada pada perjakan sehingga tidak dapat dinilai, realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai target Renstra, terdapat peningkatan yang signifikan dalam realisasi kinerja dari tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024, namun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk tahun kedepannya.

**8. Realisasi kinerja Persentase Penyelenggaraan keprotokol dan komunikasi pimpinan**

- o Ralisasi capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada karena tidak masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) sehingga tidak ada nilainya”;
- o Realisasi capaian kinerja tahun 2024 melebihi target Renstra 0%”;
- o Target Renstra untuk indikator persentase penyelenggaraan keprotolan dan komunikasi pimpinan tidak ada.

Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator Persentase Penyelenggaraan keprotokol dan komunikasi pimpinan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada pada perjakan sehingga tidak dapat dinilai, realisasi capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai target, untuk tahun depanya akan dilakukan evaluasi dan perbaikan kembali untuk indikator persentase penyelenggaraan keprotokolan dan kominikasi pimpinan.



Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat

9. Realisasi kinerja indikator Nilai LPPD Pemerintah Daerah

- Realisasi kinerja tahun 2022 belum mencapai target Renstra (Sedang vs Tinggi);
- Realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target Renstra (Tinggi);
- Realisasi kinerja tahun 2024 belum keluar, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra.

Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator nilai LPPD Pemerintah Daerah untuk tahun 2022 belum mencapai target Renstra, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target Renstra B, dan perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa kinerja tahun 2024 dapat mencapai target Renstra (Tinggi).

10. Realisasi kinerja indikator persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan ananat Undang-undang

- Realisasi kinerja tahun 2022 mencapai target Renstra 100%;
- Realisasi kinerja tahun 2023 melebihi target Renstra (107,74% vs 100%);
- Realisasi kinerja tahun 2024 juga melebihi target Renstra (111% vs 100%).

Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator nilai LPPD Pemerintah Daerah untuk tahun 2022 belum mencapai target Renstra, realisasi kinerja tahun 2023 telah mencapai target Renstra B, dan perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa kinerja tahun 2024 dapat mencapai target Renstra (Tinggi).

11. Realisasi kinerja indikator tingkat kerukunan dan kehidupan beragama kemasyarakatan

- Pada tahun 2022, realisasi kinerja masih 0%, artinya belum ada kemajuan yang signifikan dalam mencapai target Renstra;
- Namun, pada tahun 2023, realisasi kinerja meningkat secara signifikan menjadi 100%, artinya target Renstra telah tercapai;
- Pada tahun 2024, realisasi kinerja masih tetap pada 100%, artinya target Renstra masih tercapai dan kinerja tetap stabil.





12. Realisasi kinerja indikator Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan

- Tahun 2022: Realisasi kinerja sedang, belum mencapai target Renstra (60%);
- Tahun 2023: Realisasi kinerja tinggi, melebihi target Renstra (60%);
- Tahun 2024: Realisasi kinerja 100%, jauh melebihi target Renstra (60%).

Realisasi kinerja tahun 2022 belum mencapai target Renstra, Realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 telah melebihi target Renstra, Secara umum kinerja telah meningkat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024, dan telah mencapai tingkat yang sangat baik.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama

13. Realisasi kinerja indikator Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha

- Realisasi kinerja tahun 2022 belum mencapai target Renstra;
- Realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 telah melebihi target Renstra;
- Kinerja telah meningkat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024.

Dengan demikian realisasi kinerja telah meningkat secara signifikan dan melebihi target Renstra pada tahun 2023 dan tahun 2024.

14. Realisasi kinerja indikator Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR

- Realisasi kinerja tahun 2022 tidak ada, jauh dari target Renstra;
- Realisasi kinerja tahun 2023 masih jauh dari target Renstra;
- Realisasi kinerja tahun 2024 mendekati target Renstra, namun masih belum mencapai target.

Dengan demikian realisasi kinerja meningkat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024, namun masih perlu perbaikan untuk mencapai target Renstra.

15. Realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan.

- Realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 tidak ada, jauh dari target Renstra;



- o Realisasi kinerja tahun 2024 melebihi target Renstra, menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dengan demikian Realisasi kinerja meningkat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024, dan telah melebihi target Renstra.

16. Realisasi kinerja indikator Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah

- o Realisasi kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 telah melebihi target Renstra;
- o Realisasi kinerja tahun 2023 merupakan yang tertinggi, dengan 129% melebihi target Renstra;
- o Kinerja pengadaan paket telah stabil dan konsisten melebihi target Renstra.

17. Realisasi kinerja indikator Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana

- o Realisasi kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 telah melebihi target RENSTRA sebesar 60%;
- o Realisasi kinerja tahun 2023 merupakan yang tertinggi dengan nilai 129%;
- o Realisasi kinerja tahun 2024 menurun menjadi 94%, namun masih melebihi target RENSTRA.

6. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Bahwa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tidak atau belum ada pembandingan dengan realisasi kinerja standar nasional dalam menganalisa pencapaian kinerja terhadap indikator yang ada, sehingga tidak ada pembandingan realisasi kinerja tahun ini dengan indikator realisasi kinerja standar nasional.

7. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas dan sinergi tugas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator 1 Indeks Reformasi Birokrasi



**Penyebab Kegagalan:**

- Kurangnya data dan informasi yang akurat tentang realisasi Indeks Reformasi Birokrasi;
- Belum adanya evaluasi yang komprehensif tentang kinerja Pemerintahan Daerah.

**Solusi**

- Melakukan evaluasi yang komprehensif tentang kinerja Pemerintahan Daerah;
- Mengumpulkan data dan informasi yang akurat tentang realisasi Indeks Reformasi Birokrasi;
- Meningkatkan sinergi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban;
- Meningkatkan opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Rekomendasi:**

- Melakukan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus tentang kinerja Pemerintahan Daerah;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Dengan demikian, diharapkan kinerja Pemerintahan Daerah dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

**Indikator 2 Nilai Pelayanan Publik**

**Penyebab Keberhasilan:**

- Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang baik;
- Sinergi yang efektif antara dokumen-dokumen tersebut;
- Opini publik yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan.

**Solusi**



- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban;
- Meningkatkan sinergi antara dokumen-dokumen tersebut;
- Meningkatkan opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Rekomendasi:**

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun, perlu diingat bahwa persentase 1000% tidak masuk akal, karena nilai maksimum yang dapat dicapai adalah 100%. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi ulang tentang data dan informasi yang digunakan.

**Indikator 3 Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

**Penyebab Keberhasilan:**

- Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang baik;
- Sinergi yang efektif antara dokumen-dokumen tersebut;
- Opini publik yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan;
- Komitmen dan dedikasi dari tim yang terlibat dalam penyusunan Sakip.

**Solusi:**

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban;
- Meningkatkan sinergi antara dokumen-dokumen tersebut;
- Meningkatkan opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Rekomendasi:**



- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan persentase 100%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

#### Indikator 4 Tingkat Kepuasan Masyarakat

##### Penyebab Keberhasilan:

- Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang baik;
- Sinergi yang efektif antara dokumen-dokumen tersebut;
- Opini publik yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Pengelolaan yang efektif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat

##### Solusi:

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban;
- Meningkatkan sinergi antara dokumen-dokumen tersebut;
- Meningkatkan opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Meningkatkan pengelolaan yang efektif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.

##### Rekomendasi:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Dengan persentase 100%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan tersebut.

Indikator 5 Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran

Penyebab Keberhasilan:

- Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang baik;
- Sinergi yang efektif antara dokumen-dokumen tersebut;
- Opini publik yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Solusi:

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban;
- Meningkatkan sinergi antara dokumen-dokumen tersebut;
- Meningkatkan opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Meningkatkan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Rekomendasi:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan persentase 100%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan tersebut.



Indikator 6 Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran

Penyebab keberhasilan:

- Pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
- Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang baik;
- Sinergi yang efektif antara dokumen-dokumen tersebut;
- Opini publik yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Faktor Pendukung:

- Komitmen dan dedikasi dari tim yang terlibat dalam pengelolaan administrasi perkantoran;
- Penggunaan teknologi yang efektif dalam pengelolaan administrasi perkantoran;
- Pengelolaan yang efektif dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban.

Rekomendasi:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan capaian 100%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

Indikator 7 Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan

Penyebab Keberhasilan:

- Pengelolaan komunikasi dan protokol yang efektif dan efisien;
- Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang baik;
- Sinergi yang efektif antara dokumen-dokumen tersebut;



- o Opini publik yang positif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Faktor pendukung:

- o komitmen dan dedikasi dari tim yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi dan protokol;
- o Penggunaan teknologi yang efektif dalam pengelolaan komunikasi dan protokol;
- o Pengelolaan yang efektif dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban.

Rekomendasi:

- o Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- o Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- o Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan capaian 100%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat

Indikator 8 Nilai LPPD Pemerintah Daerah

Penyebab Kegagalan:

- o Belum adanya data dan informasi yang akurat tentang realisasi Nilai LPPD;
- o Proses pengumpulan data dan evaluasi belum selesai;
- o Kemungkinan adanya keterlambatan dalam proses pengumpulan data dan evaluasi.

Solusi:





- Mengumpulkan data dan informasi yang akurat tentang realisasi Nilai LPPD;
- Menyelesaikan proses evaluasi dan pengumpulan data;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara tim yang terlibat dalam pengumpulan data dan evaluasi.

**Rekomendasi:**

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan data dan evaluasi;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan data dan evaluasi.

Dengan capaian 0%, menunjukkan bahwa target belum tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat ditingkatkan di masa depan, Selain itu, perlu juga dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kegagalan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

**Indikator 9 Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang**

**Penyebab Keberhasilan:**

- Pengelolaan regulasi yang efektif dan efisien;
- Komitmen dan dedikasi dari tim yang terlibat dalam pengelolaan regulasi;
- Penggunaan teknologi yang efektif dalam pengelolaan regulasi;
- Koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dalam pengelolaan regulasi.

**Faktor pendukung:**

- Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk pengelolaan regulasi;
- Pengelolaan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam pengelolaan regulasi;
- Pengelolaan evaluasi yang efektif untuk memastikan kualitas regulasi.



**Rekomendasi:**

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan regulasi;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan regulasi.

Dengan capaian 111%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan dan bahkan melebihi target. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan, Selain itu, perlu juga dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Indikator 10 Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan

**Penyebab Keberhasilan:**

- Pengelolaan pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan yang efektif dan efisien;
- Komitmen dan dedikasi dari tim yang terlibat dalam pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan;
- Penggunaan teknologi yang efektif dalam pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan;
- Koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan.

**Faktor Pendukung:**

- Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan;
- Pengelolaan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan;
- Pengelolaan evaluasi yang efektif untuk memastikan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan.

**Rekomendasi:**



- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan.

Dengan capaian 100%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama.

Indikator 11 Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha

Penyebab Keberhasilan

- Pengelolaan kerjasama yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
- Komitmen dan dedikasi dari tim yang terlibat dalam kerjasama;
- Penggunaan teknologi yang efektif dalam komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
- Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung kerjasama.

Faktor Pendukung:

- Kebijakan yang mendukung kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
- Pengelolaan komunikasi yang efektif dengan Dunia Usaha;
- Pengelolaan evaluasi yang efektif untuk memastikan kualitas kerjasama.

Rekomendasi:

- Meningkatkan partisipasi Dunia Usaha dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha.



Dengan capaian 100%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

Indikator 12 Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan

Penyebab Keberhasilan:

- Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien oleh OPD;
- Realisasi fisik yang sesuai dengan target triwulan;
- Komitmen dan dedikasi dari tim OPD dalam mencapai target;
- Penggunaan teknologi yang efektif dalam pengelolaan anggaran dan realisasi fisik.

Faktor Pendukung:

- Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung realisasi fisik dan penyerapan anggaran;
- Pengelolaan komunikasi yang efektif antara OPD dan instansi terkait;
- Pengelolaan evaluasi yang efektif untuk memastikan kualitas realisasi fisik dan penyerapan anggaran.

Rekomendasi:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan realisasi fisik.

Dengan capaian 100%, menunjukkan bahwa target telah tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.

Indikator 12 Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana

Penyebab Keberhasilan:

- Pengelolaan pengadaan yang efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah;
- Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pengadaan;



- Penggunaan teknologi yang efektif dalam pengelolaan pengadaan.

Penyebab Kegagalan:

- Keterlambatan dalam proses pengadaan (1,09%);
- Kurangnya koordinasi antara instansi terkait;
- Kurangnya sumber daya untuk mendukung pengadaan.

Solusi:

- Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait;
- Meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengadaan;
- Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan.

Rekomendasi:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan;
- Meningkatkan kualitas pengadaan dengan memperhatikan aspek kualitas, harga, dan waktu.

Dengan capaian 94%, menunjukkan bahwa target hampir tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja dapat ditingkatkan di masa depan.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mewujudkan kinerja organisasi, Sekretariat Daerah telah menjalankan berbagai program kegiatan pada tahun 2024 yang tertuang pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang menjadi acuan atau dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran yang terdiri dari 3 program kegiatan yang telah ditetapkan terdapat 19 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang tersebar di 10 Bagian Sekretarian Daerah. Dari jumlah program, kegiatan, serta sub kegiatan diatas, ada beberapa kegiatan atau sub kegiatan yang menjadi acuan untuk mencapai atau upaya meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dengan berdasarkan dokumen



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja, Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

**Tabel: 3.6  
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024  
terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	SISA ANGGARAN
<b>04.01.00 'SEKRETARIAT DAERAH</b>				
<b>01.00.00 'SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>32.913.614.485</b>	<b>28.115.135.950</b>	<b>85,42%</b>	<b>4.798.478.535</b>
<b>04.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>26.175.973.015</b>	<b>25.186.173.679</b>	<b>92,50%</b>	<b>989.799.336</b>
<b>4.01.01.2.01.00 'Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>92.405.660</b>	<b>82.492.050</b>	<b>89,27%</b>	<b>9.913.610</b>
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.902.500	39.521.800	92,12%	3.380.700
4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.480.000	1.658.000	66,85%	822.000
4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.145.000	2.554.500	49,65%	2.590.500
4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.326.000	11.556.200	93,75%	769.800
4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.541.160	5.929.050	90,64%	612.110
4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.671.000	7.833.200	90,34%	837.800
4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.340.000	13.439.300	93,72%	900.700
<b>4.01.01.2.02.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.168.905.541</b>	<b>10.755.352.141</b>	<b>96,30%</b>	<b>413.553.400</b>
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.122.206.041	10.715.666.691	96,34%	406.539.350
4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.303.000	8.217.050	79,75%	2.085.950
4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.295.000	3.305.500	76,96%	989.500
4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.021.500	9.715.100	88,15%	1.306.400
4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.838.000	10.524.800	88,91%	1.313.200



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.242.000	7.923.000	85,73%	1.319.000
<b>4.01.01.2.03.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>184.204.100</b>	<b>137.016.570</b>	<b>74,38%</b>	<b>47.187.530</b>
4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.621.000	13.894.500	95,03%	726.500
4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.649.000	1.248.000	75,68%	401.000
4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.590.500	5.319.400	95,15%	271.100
4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0,00%	-
4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	122.491.000	116.554.670	95,15%	5.936.330
4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	39.852.600	-	0,00%	39.852.600
<b>4.01.01.2.06.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.415.795.750</b>	<b>3.359.112.979</b>	<b>98,34%</b>	<b>56.682.771</b>
4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	142.928.000	135.265.000	94,64%	7.663.000
4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.489.200	80.049.000	94,74%	4.440.200
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.372.500	315.895.400	97,39%	8.477.100
4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.780.000	7.506.000	76,75%	2.274.000
4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	512.310.000	502.696.900	98,12%	9.613.100
4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.341.050	169.335.000	92,36%	14.006.050
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.116.000	72.109.000	99,99%	7.000
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.031.459.000	2.031.456.679	100,00%	2.321
4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	0,00%	-
4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.000.000	44.800.000	81,45%	10.200.000
<b>4.01.01.2.08.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.565.243.538</b>	<b>6.329.055.989</b>	<b>96,40%</b>	<b>236.187.549</b>
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.163.938.314	1.060.524.257	91,12%	103.414.057
4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-		-
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.750.836.432	4.628.246.232	97,42%	122.590.200



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.468.792	640.285.500	98,43%	10.183.292
<b>4.01.01.2.11.00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>659.221.625</b>	<b>597.308.690</b>	<b>90,61%</b>	<b>61.912.935</b>
4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	85.200.000	78.900.000	92,61%	6.300.000
4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	0,00%	-
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.021.625	152.408.690	87,58%	21.612.935
4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	366.000.000	91,50%	34.000.000
<b>4.01.01.2.12.00 Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.170.496.000</b>	<b>1.129.913.500</b>	<b>96,53%</b>	<b>40.582.500</b>
4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	561.600.000	554.953.500	98,82%	6.646.500
4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	381.600.000	356.693.000	93,47%	24.907.000
4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	227.296.000	218.267.000	96,03%	9.029.000
<b>4.01.01.2.05.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.548.000</b>	<b>19.750.011</b>	<b>83,87%</b>	<b>3.797.989</b>
4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0,00%	-
4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.560.000	-	0,00%	2.560.000
4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.988.000	19.750.011	94,10%	1.237.989
<b>4.01.01.2.07.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.049.747.501</b>	<b>1.047.750.000</b>	<b>99,81%</b>	<b>1.997.501</b>
4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.375.000	600.300.000	99,99%	75.000
4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	13.000.000	12.750.000	98,08%	250.000
4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.021.200	358.000.000	99,99%	21.200
4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.351.301	76.700.000	97,89%	1.651.301
<b>4.01.01.2.09.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>897.536.300</b>	<b>796.148.900</b>	<b>88,70%</b>	<b>101.387.400</b>
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	620.428.300	562.803.000	90,71%	57.625.300
4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.000.000	63.445.900	94,70%	3.554.100





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	-	-	0,00%	-
4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.108.000	169.900.000	80,86%	40.208.000
4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0,00%	-
<b>4.01.01.2.13.00 Penataan Organisasi</b>	<b>388.806.000</b>	<b>372.485.937</b>	<b>95,80%</b>	<b>16.320.063</b>
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	131.771.000	127.204.558	96,53%	4.566.442
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	89.034.000	85.635.979	96,18%	3.398.021
4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.830.000	54.154.600	89,03%	6.675.400
4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.784.000	67.790.600	98,56%	993.400
4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.387.000	37.700.200	98,21%	686.800
<b>4.01.01.2.14.00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>560.063.000</b>	<b>559.786.912</b>	<b>99,95%</b>	<b>276.088</b>
4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	104.166.000	103.993.738	99,83%	172.262
4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	100.396.000	100.354.915	99,96%	41.085
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	355.501.000	355.438.259	99,98%	62.741
<b>4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>5.845.273.770</b>	<b>2.070.495.156</b>	<b>70,57%</b>	<b>3.774.778.614</b>
<b>4.01.02.2.01.00 Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>981.799.900</b>	<b>959.186.670</b>	<b>97,70%</b>	<b>22.613.230</b>
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	693.818.100	689.112.545	99,32%	4.705.555
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	37.108.960	35.459.100	95,55%	1.649.860
4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	250.872.840	234.615.025	93,52%	16.257.815
<b>4.01.02.2.02.00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>4.402.033.300</b>	<b>653.717.638</b>	<b>14,85%</b>	<b>3.748.315.662</b>
4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.283.528.300	536.529.219	12,53%	3.746.999.081
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100.749.000	99.605.519	98,87%	1.143.481
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	17.756.000	17.582.900	99,03%	173.100
<b>4.01.02.2.03.00 Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>	<b>461.440.570</b>	<b>457.590.848</b>	<b>99,17%</b>	<b>3.849.722</b>



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	136.596.600	133.671.715	97,86%	2.924.885
4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	181.012.970	180.619.450	99,78%	393.520
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	143.831.000	143.299.683	99,63%	531.317
<b>4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>892.367.700</b>	<b>858.467.115</b>	<b>94,51%</b>	<b>33.900.585</b>
<b>4.01.03.2.01.00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>76.332.800</b>	<b>68.886.500</b>	<b>90,24%</b>	<b>7.446.300</b>
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	39.398.800	33.369.700	84,70%	6.029.100
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	23.703.000	23.699.700	99,99%	3.300
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	13.231.000	11.817.100	89,31%	1.413.900
<b>4.01.03.2.04.00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>465.543.200</b>	<b>456.632.610</b>	<b>98,09%</b>	<b>8.910.590</b>
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	396.614.000	393.917.610	99,32%	2.696.390
4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	34.006.200	30.919.700	90,92%	3.086.500
4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	34.923.000	31.795.300	91,04%	3.127.700
<b>4.01.03.2.02.00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>70.611.900</b>	<b>66.821.159</b>	<b>94,63%</b>	<b>3.790.741</b>
4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	30.189.000	29.004.528	96,08%	1.184.472
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	14.353.000	14.332.116	99,85%	20.884
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	26.069.900	23.484.515	90,08%	2.585.385
<b>4.01.03.2.03.00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>279.879.800</b>	<b>266.126.846</b>	<b>95,09%</b>	<b>13.752.954</b>
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	178.971.100	169.879.850	94,92%	9.091.250
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	38.526.900	37.773.286	98,04%	753.614
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	62.381.800	58.473.710	93,74%	3.908.090



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan Revisi RENSTRA Tahun 2022-2026 dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2024 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sudah baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Secara garis besar hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 sesuai dengan Revisi Rencana Strategis Tahun 2022-2026 pencapaian kinerjanya diarahkan pada 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 3 (tiga) Program Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari dana APBD yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan sinergi tas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban serta opini publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	0%	Belum ada nilai
		Nilai Pelayanan Publik	100%	Sangat Tinggi
		Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Bengkayang	100%	Sangat Tinggi
		Nilai Tingkat Disiplin ASN	100%	Sangat Tinggi



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024**

		Tingkat Kepuasan Masyarakat	100%	Sangat Tinggi
		Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	0%	Belum ada nilai
		Persentase regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang	111%	Sangat Tinggi
		Tingkat kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah, serta kemitraan Pemerintahan Daerah dengan Dunia Usaha melalui kerjasama	Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha	100%	Sangat Tinggi
		Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target triwulan	100%	Sangat Tinggi
		Persentase jumlah paket pengadaan yang terlaksana	94%	Sangat Tinggi

2. Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD untuk capaian program dan kegiatan pada Tahun 2024 dalam upaya mencapai sasaran strategis, yaitu sebesar Rp.51.263.322.703,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 jumlah anggaran menjadi Rp.32.913.614.485,-. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Desember yaitu sebesar Rp.28.115.135.950,- sehingga efisiensi anggaran yang dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebesar - Rp.4.798.478.535,-.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan adanya kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang diantaranya perlu dilakukan :



- a. Perbaikan perencanaan program dan kegiatan dan estimasi penggunaan anggaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang, Renstra Perubahan, dan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabuapten Bengkayang;
- b. Diperlukan adanya review RENSTRA Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang secara berkala;
- c. Diperlukan adanya rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang pada awal tahun;
- d. Peningkatan pelaksanaan koordinasi teknis baik internal maupun dengan instansi terkait atau lintas sektoral dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan;
- e. Penambahan sarana dan prasarana pelaksanaan program dan kegiatan guna menunjang operasional kegiatan;
- f. Diperlukan adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data sehingga setiap hasil / outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambarkan dalam setiap laporan hasil kegiatan/program yang akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Kualitas perencanaan, penganggaran, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang;
- b. Komitmen pejabat pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun secara baik;
- c. Masih kurangnya SDM Aparatur, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Rencana tindak lanjut dalam upaya perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas dokumen Revisi RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 -2026 dengan menyelaraskan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- b. Melakukan pembinaan peningkatan komitmen pejabat pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan;
- c. Melakukan peningkatan kompetensi SDM Aparatur dalam penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Hal ini akan menjadi kan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, 25 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG



**YUSTIANUS, S.E., M.M.**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19691116 200003 1 004